

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 215-219

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15588797>

Efektivitas Program Bantuan Sosial Sebagai Sarana Kebijakan Ekonomi Publik

Rifki Nurahman¹, Anira Syifaa Putri Hermawati², Nurul Wahdah³, Silvi Alfiah⁴, Najla Afiah⁵, Dika Hardiansyah⁶, Luthfi Helmi⁷, Dian Herdiana⁸

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nurahmanrifky8@gmail.com, anirasyfai10@gmail.com, nurulwahdah0807@gmail.com, alfiahsilvi554@gmail.com, nfyahh@gmail.com, dikahardiansyah21@gmail.com, luthfihelmi22@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Program bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan ekonomi publik yang penting dalam upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial sebagai sarana kebijakan ekonomi publik, dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan dampak yang dirasakan penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sementara pengumpulan datanya dilakukan melalui studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial sebagai sarana kebijakan ekonomi publik cukup dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun belum cukup efektif, karena masih ada studi yang mengatakan bahwa bantuan sosial ini terdapat ketidakepatan sasaran penerima manfaat juga ada penelitian yang menyorot bahwa dengan adanya bantuan sosial ini mengurangi motivasi kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan publik, dengan lebih cermat lagi dalam mengidentifikasi masalah, sehingga tidak seringkali merubah kebijakan agar program ini dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci: *Bantuan sosial; efektivitas; kebijakan publik*

Abstract

Social assistance programs are an important public economic policy instrument in the government's efforts to improve the welfare of the community, especially the vulnerable and poor. Through various programs such as the Family Hope Program (PKH), social assistance is expected to reduce poverty, improve access to education and health services, and ease the economic burden on beneficiaries. This study aims to analyze the effectiveness of social assistance programs as a means of public economic policy, by identifying the obstacles faced and the impact felt by beneficiaries. The research utilizes a qualitative descriptive methodology, with data sourced from an extensive review of relevant literature. The results show that the social assistance program as a means of public economic policy is sufficient to meet the basic needs of the poor. However, it is not yet effective enough, because there are still studies that say that this social assistance has inaccurate targeting of beneficiaries and there are also studies that highlight that this social assistance reduces work motivation and economic independence of the community if it is not balanced with empowerment programs. Therefore, it is necessary to improve public policy, by being more careful in identifying problems, so that it does not often change policies so that this program can be optimally utilized in accordance with its objectives.

Keyword: *social assistance; Effectiveness; Public Policy*

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 25 May 2025

Accepted date: 30 May 2025

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan ekonomi publik yang penting dalam upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Hal ini menjadi salah satu instrumen kebijakan ekonomi publik yang penting di banyak negara, termasuk di Indonesia. Melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan

kesehatan, serta meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan tantangan sosial yang terus berkembang, program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Efektivitas program bantuan sosial tidak hanya diukur dari seberapa banyak dana yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, koordinasi antar lembaga, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Kebijakan bantuan sosial bertujuan untuk menciptakan jaringan pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai resiko, termasuk kehilangan pekerjaan, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya. Namun, masih terdapat tantangan seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi, dan kurangnya monitoring yang optimal, sehingga efektivitas program perlu terus diperbaiki agar dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas program ini dalam konteks ekonomi publik, apakah program tersebut mencapai tujuan yang diharapkan serta seperti apa dampaknya terhadap perekonomian lokal dan nasional. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek dari program bantuan sosial, termasuk pemanfaatan bantuan sosial, kebijakan yang sudah dilaksanakan, seberapa efektivitas bantuan sosial, serta rekomendasi kebijakan untuk masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program ini, diharapkan dapat tercipta rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian dengan merujuk pada berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan media lainnya, yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial menjadi upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dikalangan miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap masalah sosial. Bantuan ini dapat berupa uang, barang, atau layanan dan ditujukan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2019, bantuan sosial diberikan untuk meringankan beban hidup, melindungi kondisi fisik, dan mendorong potensi masyarakat tujuannya untuk membantu masyarakat agar hidup lebih sejahtera dan hidup berkelanjutan. Jadi, tidak hanya untuk orang yang kesulitan, bantuan ini juga bisa diberikan kepada mereka yang ingin berkembang agar bisa mandiri.

Secara umum, bantuan sosial dibagi menjadi empat jenis; 1) Bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial contoh memberi bantuan kepada fakir miskin yang disalurkan lewat lembaga sosial; 2) Bantuan keuangan yaitu uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 3) Subsidi akibat bencana memberi bantuan sementara untuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena bencana alam; 4) Kompensasi kebijakan pemerintah seperti subsidi BBM atau bantuan bagi warga yang terkena penggusuran karena relokasi.

Pemberian bantuan sosial sangat penting karena dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung. Selain itu, bantuan ini mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit. Dengan adanya bantuan sosial, peluang masyarakat untuk bangkit dan hidup mandiri pun menjadi lebih besar..(Dari et al., 2025)

Kebijakan publik

Kebijakan publik menjadi pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang dikatakan oleh Dye (1999) kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan juga dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Parsons, 1997). Karena menyangkut kepentingan bersama, kebijakan publik harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusannya. Ini penting terutama ketika menyangkut masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat (Suryono, 2018)

Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah akan memilih berbagai alternatif solusi yang dianggap paling tepat. Proses ini akan melibatkan berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang saling memengaruhi. Dalam tahap ini, pemerintah memilih berbagai pilihan kebijakan, menyusun alternatif solusi, lalu mempersempit pilihan tersebut sebelum menetapkan keputusan akhir (Sidney, 2007: 79).

Kebijakan publik yang baik harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah membuat kebijakan tanpa mendengar suara masyarakat, maka hasilnya bisa saja tidak tepat atau bahkan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan cara ini, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan bisa benar-benar membantu. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membuat pemerintah lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Efektivitas

Efektivitas dalam KBBI bermakna sebuah kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dan juga tujuan yang akan dicapai dari rencana tersebut. Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas merupakan sebuah ukuran dari suatu rencana yang dibuat dalam suatu organisasi dengan mengukur dari capaian tujuan yang telah direncanakan berjalan dengan sesuai. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Beni (2016: 69) Efektivitas hubungan antara rencana dengan tujuan yang dapat diukur seberapa besar rencana yang dibuat dengan kebijakan yang diterapkan.

Mengukur efektivitas sangat penting, karena dari situ bisa terlihat apakah program atau kebijakan tersebut benar-benar membantu masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Jika tujuan organisasi atau instansi bisa tercapai sesuai rencana, maka program tersebut bisa dikatakan efektif (Zakiyah et al., 2020)

Mengukur efektivitas sangat penting agar program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tapi juga memberikan hasil yang nyata. Tanpa pengukuran, kita tidak akan tahu apakah rencana yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru membuang waktu dan sumber daya.

Dengan mengetahui tingkat efektivitas, pemerintah atau instansi bisa memperbaiki kekurangan dan membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan bantuan.

Studi menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat (Anggraini, 2018:13). Selain itu, program bantuan sosial juga berperan sebagai stabilisator sosial-ekonomi pada masa krisis, seperti saat pandemi COVID-19 (Febrianti, 2021:115).

Masyarakat miskin telah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik berkat program-program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. (Anwar, 2024). Selain memberikan daya beli manfaat yang lebih besar kepada para penerima, bantuan ini juga membuat layanan kesehatan dan pendidikan lebih mudah diakses. (Rahmadhani, 2023). Selain itu, jika bantuan sosial didistribusikan secara merata dan terbuka, bantuan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan non miskin. (Suharto, 2024)

Dari data tersebut terlihat bahwa program bantuan sosial memiliki manfaat yang besar, seperti saat pandemi COVID-19 bantuan sosial memiliki peran sebagai stabilisator pada masa tersebut. Adapun studi yang dilakukan pada 3 tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa bantuan sosial seperti PKH dan BPNT mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 mengenai Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1.

Yumna et al. (2024) mencatat bahwa perubahan kebijakan yang sering terjadi dalam program bantuan sosial menciptakan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Ketidakjelasan mengenai kriteria penerima dan mekanisme distribusi seringkali membingungkan masyarakat serta memperlambat efektivitas program. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas bantuan sosial sangat diperlukan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan dan menghindari siklus ketergantungan (Sari, 2024)

Dari riset tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sering terjadi yang membuat program bantuan sosial dapat menciptakan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Hal ini berkebalikan dengan teori yang disampaikan Sidney (2007: 79) yang mengatakan bahwa perumusan kebijakan publik melibatkan aktivitas identifikasi, dengan sering terjadinya perubahan kebijakan menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi masalah pemerintah terlalu terburu-buru sehingga sering terjadi ketidakpastian bagi penerima manfaat.

Dalam konteks efektivitas, Mardiasmo (2017:87) menekankan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu program dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Bila tujuan dari program bantuan sosial adalah mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian, maka indikator seperti peningkatan penghasilan, keberlanjutan ekonomi rumah tangga, dan kemandirian usaha harus menjadi tolok ukur. Hal ini juga didukung oleh Beni (2016:69), yang menekankan bahwa efektivitas berkaitan langsung dengan hubungan antara rencana kebijakan dan hasil aktual di lapangan.

Namun, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran. Masalah klasik yang sering muncul adalah ketidaktepatan data penerima manfaat, sehingga bantuan tidak selalu sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan (Rahayu, 2020:45). Selain itu, keterlambatan distribusi dan kurangnya monitoring juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Siregar, 2019:23).

Studi yang dilakukan oleh (Alfajri & Rahmawati, 2025) mengatakan bahwa efektivitas bantuan sosial, khususnya PKH di Desa Labuhan Ratu Satu sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Berdasarkan data lapangan, beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat ternyata tidak terdaftar dalam program. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi data dan validasi penerima manfaat.

Namun, beberapa penelitian juga menyoroti bahwa ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat mengurangi motivasi kerja dan kemandirian ekonomi jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan (Beni, 2016:71). Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran bisa menjadikan masyarakat terlalu bergantung pada bantuan tersebut. Padahal tujuan utama bantuan sosial untuk memperkuat ekonomi keluarga miskin agar mereka bisa bertahan saat menghadapi krisis atau tekanan. Bantuan ini bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan agar keluarga miskin tidak semakin rentan secara ekonomi..(Dari et al., 2025)

Dari studi yang dilaksanakan di desa Labuhan Ratu satu dalam program bantuan sosial, khususnya PKH tidak selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Zakiyah (2020) yang mengatakan bahwa keefektifan suatu program dapat diamati dari beberapa indikator salah satunya ketepatan penentuan sasaran. Dalam studi tersebut, diperoleh data lapangan ada beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat namun ternyata tidak terdaftar dalam program.

Uraian efektivitas program bantuan sosial sebagai sarana kebijakan ekonomi publik sebagaimana dijelaskan diatas mengonstruksikan pemahaman bahwa pengelolaan program bantuan sosial perlu terus mengembangkan kebijakan guna mewujudkan sistem program bantuan sosial yang efektif. Didasarkan kepada hal tersebut, berikut adalah rekomendasi kebijakan sebagai hasil analisis dalam artikel ini, yaitu:

Pertama melibatkan masyarakat lokal meningkatkan validasi data penerima manfaat, sehingga memungkinkan dukungan yang lebih tepat sasaran. Kedua, metode pendistribusian bantuan harus dioptimalkan untuk menjamin pengiriman yang lebih tepat waktu dan meminimalkan ketidakpastian. Ketiga, mengedukasi penerima bantuan tentang cara menggunakan bantuan secara efektif untuk mengoptimalkan dampak keuangan program.

Ketiga rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan bencana alam dengan lebih efektif.

SIMPULAN

Simpulan memuat generalisasi hasil temuan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian serta berisi rekomendasi untuk langkah berikutnya.

Program bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meringankan beban ekonomi penerima manfaat.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, koordinasi antar lembaga, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan. Program ini juga berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan bencana alam.

Namun, tantangan seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi, dan kurangnya monitoring masih perlu diatasi agar efektivitas program dapat meningkat dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan program mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Singkatnya, program bantuan sosial di Indonesia adalah alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan sosial, dengan keberhasilan yang bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Alfajri, R., & Rahmawati, A. (2025). *Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jiane : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7, 1–7.
- Dari, E., Penelitian, B., Febina, G., Purba, B., Sinulingga, D. M. C., & Togatorop, J. (2025). *Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan :*
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Anwar, A. (2024). Efektivitas bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial dan Ekonomi*, 12(1), 21-35. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Rahmadhani, N. I. (2023). Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara(Skripsi). Universitas Mulawarman
- Suharto, E. (2024). Implementasi bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan di Desa Banjarbendo. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 45-60. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. 2-18
- Rahayu,S (2020).Problematika Data Penerima Bantuan Sosial di indonesia.Jurnal, Kebijakan Sosial,8(1)45-50.
- Siregar,H.(2019). Transportasi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial.Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,6(1),23-28
- Febrianti,R (2021).Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2),112-118.
- Beni,A (2016).manajemen kinerja dalam sektor publik.jakarta: Ghalia Indonesia
- Parsons, USA: Wayne.1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc.
- Mardiasmo.(2017).Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:Andi Offset.
- Sidney. 2007. Perumusan Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Amidjaya. Jakarta: BNSP